



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN -PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Analisis Presidential Character Paus Fransiskus terhadap
Isu Kemanusiaan melalui Ensiklik Fratelli Tutti***

Skripsi

Diajukan untuk ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Christoforus Karang Wicaksono

6092001226

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN -PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Analisis Presidential Character Paus Fransiskus terhadap
Isu Kemanusiaan melalui Ensiklik Fratelli Tutti***

Skripsi

Oleh

Christoforus Karang Wicaksono

6092001226

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Christoforus Karang Wicaksono
Nomor Pokok : 6092001226
Judul : Analisis Presidential Character Paus Fransiskus terhadap Isu Kemanusiaan melalui Ensiklik Fratelli Tutti

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 3 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D.

: 

Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christoforus Karang Wicaksono

NPM : 6092001226

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Analisis Presidential Character Paus Fransiskus terhadap Isu Kemanusiaan melalui Ensiklik Fratelli Tutti

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Desember 2023



Christoforus Karang Wicaksono

ABSTRAK

Nama : Christoforus Karang Wicaksono
NPM : 6092001226
Judul : Analisis *Presidential Character* Paus Fransiskus terhadap Isu Kemanusiaan melalui Ensiklik *Fratelli Tutti*

Paus merupakan pemimpin tertinggi atas pemerintahan Gereja seluruh dunia. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang Paus hanya lebih mengurus kuasa atas urusan Gereja. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Paus Fransiskus telah mengubah kondisi ideal tersebut sehingga membawanya terlibat dalam isu-isu yang berada di luar urusan Gereja, terlebih melalui isu kemanusiaan. Mencermati anomali tersebut, penelitian ini berusaha menyelidiki rumusan masalah mengenai bagaimana aspek presidential character Paus Fransiskus mempengaruhi kebijakan terhadap isu kemanusiaan melalui ensiklik *Fratelli Tutti*. Teori analisis wacana Norman Fairclough, penulis mengupas analisis Ensiklik *Fratelli Tutti* dan pidato penerbitan secara mendalam. Kemudian, penggunaan teori Presidential Character dan tipologi Preston, metode penelitian kualitatif-deskriptif, dan teknik pengumpulan data studi pustaka sebagai cara untuk mengetahui alasan terdalem Paus Fransiskus ikut terlibat urusan dunia. Penelitian ini secara umum menemukan bahwa dalam menjalankan tindakan pemerintahan, Paus Fransiskus terpengaruh oleh kondisi psikologisnya, sehingga secara kontinu tercermin dalam kebijakannya. Selain itu, penemuan tersebut terkonfirmasi dalam analisis Ensiklik *Fratelli Tutti* dan struktur pemerintahan Vatikan yang menyebabkan Paus leluasa mengimplementasi kebijakannya. Penemuan khusus, melalui teori Presidential Character terdapat korelasi yang kuat antara kecenderungan-kecenderungan kebijakan yang diambil semasa menjadi Paus (masa dewasa) dengan kecenderungan-kecenderungan tindakan yang tercermin dalam masa kanak-kanak dan masa remaja. Kemudian, melalui tipologi Preston, penelitian menemukan bahwa adanya keleluasaan yang tinggi bagi Paus Fransiskus dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan instrumen isu yang menjadi perhatiannya. Dengan demikian, figur Paus Fransiskus sebagai pemimpin agama, dapat dikatakan memberikan khazanah baru bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional dalam membuka kemungkinan pemaknaan isu yang hangat tersorot di dunia.

Kata Kunci: Presidential Character, Tipologi Preston, Paus Fransiskus, Isu Kemanusiaan, Ensiklik *Fratelli Tutti*

ABSTRACT

Name : Christoforus Karang Wicaksono
NPM : 6092001226
Title : Presidential Character Analysis of Pope Franciscus on
Humanitarian Issues through the Encyclical Fratelli Tutti

The Pope is the supreme leader of the worldwide Church government. In implementing his rule, the Pope is only concerned with implementing his power over the affairs of the Church. However, on progress, Pope Francis has changed that ideal, leading him to get involved in issues that are beyond the Church's purview, especially through humanitarian issues. Observing this anomaly, this research seeks to investigate a research question regarding how Pope Francis' presidential character aspects affect policies towards humanitarian issues through the encyclical Fratelli Tutti. Norman Fairclough's discourse analysis theory, I explore the analysis of the Fratelli Tutti Encyclical and the publishing speech in depth. Then use Presidential Character Theory and Preston's typology, qualitative-descriptive research methods, and literature study data collection techniques as a way to find out the deepest reasons for Pope Francis to be involved in world affairs. This research generally found that in carrying out governmental actions, Pope Francis is influenced by his psychological state, which is continually reflected in his policies. In addition, this finding was confirmed in the analysis of the Encyclical Fratelli Tutti, and the structure of the Vatican government that allows the Pope free to implement his policies. Through the special finding Presidential Character theory, there is a strong correlation between the policy traits taken during his time as Pope (adulthood) and the action traits reflected in childhood and adolescence. Then, through Preston's typology, this research found that there is a high degree of discretion for Pope Francis in implementing policies according to the issue instruments that concern him. Thus, the figure of Pope Francis as a religious leader can be said to provide new treasures for the development of international relations in opening up the possibility of interpreting issues that are highlighted in the world.

Keywords: Presidential Character, Preston Typology, Pope Francis, Humanitarian Issue, Encyclical Fratelli Tutti

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan hikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis *Presidential Character* Paus Fransiskus terhadap Isu Kemanusiaan melalui Ensiklik *Fratelli Tutti*.” Fungsi dari penelitian ini adalah sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan dan memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian ini memuat analisis yang berkaitan aspek psikologi politik yang menjadi kecenderungannya dalam mengadvokasi isu kemanusiaan yang menjadi konsennya akhir-akhir ini, terkhusus pengalaman masa lalu yang mempengaruhinya dalam membuat kebijakan. Lebih lanjut, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral sekaligus materiil. Penulis juga turut berterima kasih kepada Mas Sapta Dwikardana, Ph.D., sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bantuan teknis, dan substansi kepada penelitian ini, serta rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang hadir dalam kondisi apapun sepanjang penelitian ini disusun.

Penulis sepenuhnya menyadari terdapatnya kekurangan dalam skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan yang penulis miliki, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diterima oleh penulis sebagai perbaikan. Penulis juga berharap agar skripsi ini membawa manfaat bagi para pembaca, terlebih pada bidang ilmu hubungan internasional.

Bandung, 2 Desember 2023
Christoforus Karang Wicaksono

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang senantiasa membantu dalam penelitian ini.

Pertama, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kesehatan dan berkat sehingga penulis menyelesaikan seluruh proses rangkaian kuliah ini.

Kedua, penulis mengucapkan terima kasih kepada Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol., dan Sapta Dwikardana, Ph.D. sebagai Dosen pembimbing Rancangan Penelitian Kajian Politik Media dan Masyarakat Transnasional dan Dosen pembimbing Skripsi, yang senantiasa memberikan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.

Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pater Dr. F.X. Rudiyanto Subagio, OSC; para dosen FISIP HI UNPAR, para biarawan Yesuit, yang membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah maupun penelitian ini.

Keempat, penulis mengucapkan terima kasih kepada papi, mami, dan adik, yang memberikan dukungan tanpa henti berupa doa, materi, maupun moralitas.

Kelima, penulis mengucapkan terima kasih kepada Adam Abil Tsaqafy, Vincentius Aditya, Karen Abigail, Princessa Nikita, Laras, Shania Swarnadwipa, Made, Kevin Togar, Jason Thaddeus, Viandra Syawali, Ida Ayu, Haykal, Jacky, Kezia Kirana, Ruby, Safira Indira, Claresta Hutapea, Rinaldy, Ari, Anggie, Rey, Jeremia Ezerya, Bosco, Meinita, ibu Desy, ibu Hilmi yang memberikan dukungan pertemanan, walaupun terkadang pertemanan itu beberapa ada yang perlu kandas.

Keenam, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan perannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	5
ABSTRACT.....	6
KATA PENGANTAR.....	7
UCAPAN TERIMA KASIH.....	8
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	13
BAB 1.....	14
PENDAHULUAN.....	14
1.1. Latar Belakang Masalah.....	14
1.2. Identifikasi Masalah.....	19
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	19
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	22
1.2.3. Rumusan Masalah.....	23
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	23
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	23
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	23
1.4. Kajian Literatur.....	24
1.5. Kerangka Pemikiran.....	34
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
1.6.1. Metode Penelitian.....	42

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.7. Sistematika Pembahasan.....	44
BAB 2.....	45
Keterlibatan Paus Fransiskus dalam Isu Kemanusiaan di Dunia.....	45
2.1. Ensiklik Fratelli Tutti.....	45
2.1.1. Pengertian dan Kedudukan Ensiklik.....	45
2.1.2. Penerbitan Ensiklik Fratelli Tutti.....	46
2.2. Analisis Pidato Paus Fransiskus.....	48
2.2.1. Berfokus pada Kesalahan Sosial dalam Aspek Semiotik.....	51
2.2.2. Mengidentifikasi Penghalang-penghalang pada Kesalahan Sosial.....	57
2.2.3. Adanya Pertimbangan Tatanan Sosial ‘Membutuhkan’ Kesalahan Sosial.	57
2.2.4. Mengidentifikasi Solusi Mengatasi Hambatan-hambatan Sosial.....	60
2.3. Analisis Ensiklik Fratelli Tutti.....	61
2.3.1. Berfokus pada Kesalahan Sosial dalam Aspek Semiotik.....	61
2.3.2. Mengidentifikasi Penghalang-penghalang pada Kesalahan Sosial.....	67
2.3.3. Adanya Pertimbangan Tatanan Sosial ‘Membutuhkan’ Kesalahan Sosial.	70
2.3.4. Mengidentifikasi Solusi Mengatasi Hambatan-hambatan Sosial.....	74
2.4. Struktur Pemerintahan Vatikan.....	78
2.4.1. The Roman Curia (Kuria Roma).....	78
2.4.2. Dewan Kardinal (The College of Cardinal).....	81

2.4.3. Posisi Seorang Paus dan Wewenang Pemerintahan.....	82
BAB 3.....	85
Memahami Kardinal Bergoglio dengan Perspektif Psikologi Politik.....	85
3.1. Menilik Kardinal Bergoglio dari Instrumen Karakter.....	86
3.2. Menilik Kardinal Bergoglio dari Instrumen Cara Pandang.....	91
3.3. Menilik Kardinal Bergoglio dari Instrumen Gaya.....	95
3.3.1. Pedoman Serikat Yesus sebagai Pembentuk Paus Fransiskus.....	95
3.3.2. Kardinal Bergoglio dari Instrumen Gaya.....	98
3.4. Penempatan Kardinal Bergoglio berdasarkan Presidential Karakter.....	120
3.5. Penempatan Tipologi Preston.....	121
BAB 4.....	124
Kesimpulan.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	129

DAFTAR GAMBAR

2.1.2. Paus Fransiskus sedang Menandatangani Ensiklik Fratelli Tutti	47
3.1. Amalia yang Sudah Tua (Kini)	90
3.3.2. Paus Fransiskus semasa Mengalami Pendidikan Novisiat.....	101

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
HI	Hubungan Internasional
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
Kan	Kanon
Lih	Lihat
OFM	<i>Ordo Fratrum Minorum</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Paus merupakan seorang Uskup Kota Roma.¹ Kota Roma merupakan kota pusat dari Pemerintahan Gereja seluruh dunia dilaksanakan, sehingga Pemimpin Kota Roma memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Pemimpin di negara lain. Dasar demikian, yang menyebabkan Paus yang sekaligus mengemban posisi Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Paus pada dasarnya merupakan Uskup yang memimpin wilayah Kota Roma, namun memiliki keistimewaan karena Kota Roma merupakan Pusat Pemerintahan Gereja di dunia.

Kuasa Paus dalam memimpin Gereja merupakan faktor yang melekat dari dirinya sejak awal Gereja. Oleh karena kuasa yang besar dalam memimpin Gereja, Paus merupakan “sebagai pengganti Petrus, Imam Agung di Roma, sebagai Kepalanya, dan berlaku seutuhnya. Aspek keberlakuan sebagai Imam Agung Roma, maka Paus mengemban tugas sebagai Wakil Kristus dan Gembala Gereja semesta yang utuh serta penuh.”² Kuasa yang utuh dan penuh tersebut, yang kemudian ditangkap oleh Avery Dulles, seorang Teolog dan Kardinal Gereja Katolik, sebagai seorang yang mampu menetapkan doktrin-doktrin iman bersama dewannya sehingga memiliki landasan yang otoritatif (mengikat) bagi seluruh

¹ E.A. Livingstone (Third Edition Editor), *The Oxford Dictionary of the Christian Church* (New York: Oxford, 1997), 1309.

² Bdk. R.P.R. Hardawiryana, SJ (Penerjemah), *Lumen Gentium (Terang Bangsa-bangsa): Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1990), 43.

Gereja.³ Dengan demikian, apabila ada sebuah pemberontakan terhadap doktrin tersebut atau melawan putusan yang dibuat oleh Paus, tidak akan ada rekursus tertentu yang diberikan.⁴

Selain itu, pengakuan terhadap Paus yang besar ini, merupakan hal yang berasal dari sejak awal Gereja, dimana para Rasul diperintah oleh Kristus untuk melakukan tindakan pewartaan atas Kabar Sukacita ke seluruh dunia (Injil; *lih.* Mrk. 16:20). Pada waktu itu, para Rasul membentuk seperti dewan tetap pewartaan, dimana Petrus sebagai Ketua Dewan (*lih.* Yoh. 21: 15-17) tersebut.⁵ Fenomena ini yang kemudian dikenal dalam tradisi Gereja Katolik sebagai penyerahan tugas dan kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus kepadanya.⁶ Dengan demikian, pengakuan terhadap jabatan Paus merupakan jabatan yang memiliki dasar sejarah dan iman yang kuat.

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat dipahami bahwa tugas seorang Paus lebih mengurus kuasa atas seluruh Gereja. Kuasa tersebut merupakan jabatan yang utama atas seluruh Gereja dan segala perangkat di dalamnya. Oleh karena jabatannya tersebut, para Uskup di seluruh dunia memperkuat, melindungi dan mengukuhkan peran atas jabatannya tersebut (*lih.* Kan. 333).⁷ Kondisi ini memberikan pemahaman bahwa setiap kebijakan—baik itu personal maupun kolegal, yang disusun olehnya harus dibantu dalam implementasinya oleh para Uskup di seluruh dunia. Dengan demikian, pelaksanaan atas jabatan yang

³ Avery Dulles, *The Craft of Theology: From Symbol to System (New Expanded Edition)* (New York: The Crossroad Publishing Company, 1999), 4.

⁴ Mgr. Robertus Rubiyatmoko, *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), 119.

⁵ R.P.R. Hardawiryana, SJ (Penerjemah), *Lumen Gentium (Terang Bangsa-bangsa): Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja*, 37-38.

⁶ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik* (Yogyakarta dan Jakarta: Kanisius dan OBOR, 1996), 371.

⁷ Mgr. Robertus Rubiyatmoko, *Kitab Hukum Kanonik*, 119.

diembannya memiliki implementasi kepada kebutuhan-kebutuhan internal Gereja saja (lih. Kan 333—§2).⁸

Oleh karena penelitian ini membahas mengenai psikologi politik. Ilmu psikologi menjadi salah satu cabang ilmu psikologi politik. Psikologi politik adalah kombinasi kreatif antara ilmu psikologi dengan ilmu politik. Dalam hal psikologi, Cottam memberikan kemungkinan pemahaman bagi seseorang terpengaruh oleh faktor internalnya dan terkadang perilaku yang terpengaruh tersebut tidaklah rasional. Walaupun begitu, perilaku yang tidak rasional tersebut dapat menjadi rasional ketika seseorang memang memiliki kebutuhan untuk memahami dunia sekitarnya dan perilaku seseorang tersebut dapat terprediksi melalui probabilitas perilakunya berdasarkan pengamatan orang lain.⁹ Dalam hal ilmu politik, memparafrase pandangan Miriam, pemahaman tentang ilmu politik merupakan ilmu mengelola sumber daya terbatas.¹⁰ Pandangan tersebut berangkat dari fenomena setiap kelompok masyarakat kolektif seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya dan menentukan cara untuk mendistribusikan sumber daya tersebut agar kelompok sejahtera. Jika dikorelasikan secara kreatif, bagi penulis psikologi politik merupakan kecenderungan-kecenderungan seseorang dalam memahami fenomena di luar dirinya sehingga adanya upaya untuk mengelola bersama sumber daya terbatas agar bisa dinikmati semua orang. Dengan demikian, untuk memperkuat pandangan penulis, Cottam berpendapat bahwa kepribadian politik tertentu mempengaruhi seseorang dalam mengambil

⁸ Ibid.

⁹ Martha L. Cottam, Elena Mastors, Thomas Preston, dan Beth Dietz-Uhler, *Introduction to Political Psychology* (New York dan London: Routledge Taylor and Francis Group, 2016), 11.

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 13-14.

keputusan politik yang diambilnya sehingga mengungkapkan dimensi kompleks seseorang.¹¹

Dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional, Paus ternyata mendapatkan semacam hak khusus, walaupun dilihat secara umum sebagai Tahta Suci dan Negara Kota Vatikan. Dasar tersebut dijelaskan oleh Malcolm N. Shaw, sejak tahun 1870, bahwa terjadi penaklukan negara-negara Kepausan oleh tentara Italia yang bertujuan untuk mengakhiri masa keemasan mereka sebagai negara berdaulat.¹² Masa keemasan itu tercatat dalam sejarah bahwa Gereja pada Abad Pertengahan bukan saja mengurus urusan spiritual, melainkan mengurus juga bidang dunia (yang bersifat politik).¹³ Konsekuensi atas kejadian ini, memberikan implikasi bahwa terjadinya Perjanjian Lateran pada tahun 1929, yang dimana pihak Italia menandatangani kesepakatan untuk mengakui kondisi Negara Kota Vatikan dan kedaulatan Tahta Suci di hubungan internasional. Demikian pula, Negara Kota Vatikan tidak memiliki populasi permanen, yang memungkinkan penduduk tinggal, namun di sana hanya terdapat pejabat Gereja yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan Tahta Suci.¹⁴ Dengan demikian, kepentingan Tahta Suci atau Vatikan, tidak dapat seperti pada masa Abad Pertengahan, yang dapat mengurus urusan di luar Gereja, melainkan kepentingan Tahta Suci di masa kini terbatas seperti semula yaitu bidang Gereja saja.

Paus dapat mengirimkan perwakilan dalam mendukung usahanya di dunia internasional. Perwakilan tersebut memiliki keistimewaan yang sama seperti negara pada umumnya. Namun, pelaksanaan atas fungsi yang diberikan oleh

¹¹ Martha L. Cottam, Elena Mastors, Thomas Preston, dan Beth Dietz-Uhler, *Introduction to Political Psychology*, 16.

¹² Malcolm N. Shaw, *International Law* (New York: Cambridge University Press, 2008), 243-244.

¹³ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Hukum Internasional* (Klaten: Lakeisha, 2021), 38.

¹⁴ Ibid.

perwakilan Paus tidak sama dengan perwakilan negara pada umumnya. Perbedaan fungsi misi tersebut terletak pada kemampuan bahwa untuk memberikan tugas Gereja universal.¹⁵ Gelar yang diberikan kepada perwakilan Paus kepada negara penerima, adalah *Nuncius*, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin pembawa pesan. Gelar *Nuncius* yang diberikan merupakan seseorang yang telah menyandang gelar sebagai Pendeta (*priest*) dalam Gereja Katolik.¹⁶ Oleh karenanya, fungsi perwakilan yang dilakukan oleh utusan Paus hanya menyangkut dalam urusan-urusan rohaniah. Singkatnya, berdasarkan pemahaman tersebut, peran diplomasi yang dilakukan oleh Paus kepada utusannya hanya dalam bingkai (urusan-urusan kebutuhan) Gereja.

Berdasarkan dengan yang telah penulis sampaikan di muka, maka dapat dilihat bahwa psikologi politik sangat penting dalam meneliti kecenderungan-kecenderungan seseorang yang dianggap berpengaruh. Pada penelitian ini, seseorang yang penulis anggap penting adalah Paus Fransiskus, yang sekarang menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik. Paus Fransiskus, sebagai Tokoh Tertinggi Gereja, mengemban tugas hanya dalam batasan Gereja saja. Hal ini didukung bahwa Paus Fransiskus sendiri yang merupakan warga Gereja memahami wewenang yang diberikan kepadanya melalui pendekatan Kitab Hukum Kanonik. Wewenang tersebut, telah ada melalui pendekatan historis, yaitu sejak Gereja diberikan tongkat estafet kepemimpinan oleh Kristus untuk melakukan pewartaan Kabar Sukacita.

¹⁵ John R. Morss, "The International Legal Status of the Vatican/Holy See Complex," *The European Journal of International Law* 26, no. 4 (2016): 933-934, <https://academic.oup.com/ejil/article/26/4/927/2599610>.

¹⁶ *Ibid.*, 934.

Dari segi hukum internasional juga memberikan pemahaman yang sama dan menguatkan pandangan tersebut. Hukum internasional mengatur semacam ‘dasar perilaku’ dari Negara Kota Vatikan dalam pencatatan urusan global. Walaupun Vatikan mendapatkan gelar kedaulatan saat Perjanjian Lateran tahun 1929, Vatikan tidak dapat melaksanakan kehidupan seperti negara yang berdaulat sekalipun. Dalam urusan keterwakilan, misalnya, yang ternyata dilakukan oleh seorang *Nuncius*. Nuncius tugasnya lebih kepada misi Gereja Universal dan tugas tersebut adalah sama dengan Paus yang mengutus mereka ke negara penerima. Dengan demikian, dapat dipahami secara umum, Paus Fransiskus, maupun siapapun Pemimpinnya di kemudian hari, secara ideal atau normatifnya, mengemban tugas hanya dalam lingkup kebutuhan Gereja saja.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Penulis menemukan bahwa definisi atas urusan dalam Gereja berasal dari Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kitab Hukum Kanonik, tergambar bahwa Gereja memiliki tugas dan hak asli dalamewartakan Injil kepada segala bangsa melalui berbagai alat komunikasi sosial yang dimiliki Gereja. Berdasarkan jabatan seorang Paus yang mengemban urusan dalam Gereja, tidak dapat salah atau sesat (*infallibility*) karena bertindak sebagai gembala dan Pengajar Tertinggi bagi seluruh umat di bidang moral atau di bidang iman.¹⁷ Selain itu, tergambar dalam urusan dalam Gereja, tugas menguduskan. Tugas menguduskan sebagai bentuk untuk melakukan liturgi sebagai ibadat suci.¹⁸ Sedangkan, definisi atas urusan luar Gereja adalah tindakan yang di luar ketentuan Kitab Hukum Kanonik.

¹⁷ Mgr. Robertus Rubiyatmoko, *Kitab Hukum Kanonik*, 232.

¹⁸ Ibid. 254.

Dalam melihat konteks ideal dari tugas Paus adalah melayani kepentingan Gereja, namun secara realitas, tidaklah demikian. Paus Fransiskus lebih melihat urgensi isu-isu yang berada di luar Gereja sebagai bentuk kebijakan yang beliau lakukan. Hal ini terlihat dengan kebijakan utama Paus dalam menerbitkan Ensiklik *Fratelli Tutti* tanggal 3 Oktober 2020, Paus Fransiskus menerbitkan Ensiklik *Fratelli Tutti*. Dalam Ensiklik tersebut, isu kemanusiaan menjadi sentral pembahasan yang penting dengan menyebut semua orang di dunia sebagai saudara. Menurut keyakinan Paus Fransiskus, “kita tidak terjermus dalam diskusi teoretis, melainkan bersentuhan langsung dengan para korban” yang memperjuangkan kemanusiaannya akibat perang.¹⁹ Dalam Ensiklik tersebut mendorong setiap pemangku kebijakan untuk melakukan tindakan yang nyata dalam melindungi manusia terdorong karena nilai kemanusiaan yang melekat padanya.

Oleh karena ensiklik ini berfokus pada persaudaraan, maka penting untuk memahami persaudaraan dalam ensiklik tersebut. Persaudaraan dalam tradisi Kristiani memang sudah memiliki sejarah panjang. Penafsiran terhadap arti kata persaudaraan dapat dilihat dari kitab suci, bahwa berdasarkan pernyataan Yesus (Kitab Suci Perjanjian Baru), “semua yang menjadi pengikut-Nya merupakan saudara,” yang dimana Yesus menentang bahwa di antara pengikut-Nya jangan ada (salah satu atau beberapa) yang dipanggil Rabi.²⁰ Selain itu, pengertian lebih luas mengenai persaudaraan, ada pada Kitab Suci Perjanjian Lama. Berdasarkan keturunan Adam (*lih.* Kej 1-2), “Ia menjadikan kita menjadi satu seluruh umat

¹⁹ R.P. Andreas Suparman, SCJ, *Fratelli Tutti: Saudara Sekalian Ensiklik Paus Fransiskus tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020), 158.

²⁰ Wojciech Ku ko, “Fraternity in the Teaching of Pope Francis,” *Collectanea Theologica* 90, no. 5 (2020): 703, <https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/7391>.

manusia” (*lih.* Kis. 17:26). Persaudaraan ini berasal dari hubungan kekerabatan, yang kemudian disempurnakan melalui persaudaraan rohani yang percaya kepada Kristus.²¹ Persaudaraan dalam pengertian Paus Fransiskus, persaudaraan merupakan ekspresi kualitas hidup manusia yang paling penting, karena manusia saling memiliki keterikatan. Dalam keterikatan tersebut, Paus Fransiskus membantu kita agar memperlakukan setiap orang sebagai saudara dan tanpa persaudaraan Paus tidak yakin masyarakat yang adil dan damai dapat terwujud.²² Bagi penulis, gagasan terkait persaudaraan mengenai “keterikatan” (atau keterhubungan) memiliki aspek logis bahwa dalam membina keadilan dan perdamaian, tidak dapat dilakukan oleh seorang diri (mandiri atau terdiaspora). Akan tetapi, dimensi keterikatan mengajarkan bahwa dibutuhkan kolaborasi semua orang.

Persaudaraan, apabila menilikinya melalui pendekatan filsafat (konsep etika), memiliki konsekuensi yang panjang. Konsekuensi tersebut memiliki bagian yang sangat ambigu atau tidak dapat terbatas karena dapat membebani kepada si penerima norma tersebut. Persepsi tentang persaudaraan, menurut Vittorio Hösle, seorang filsuf Jerman kelahiran Italia, setidaknya memiliki anggapan bahwa adanya ikatan individualitas antara saya dengan orang lain. Ikatan individualitas tersebut sangatlah terbatas karena tidak mungkin satu orang memiliki saudara dengan mengenali persaudaraan lebih dari satu miliar orang di dunia. Sedangkan, di sisi lain, durasi usia kita tidak cukup memadai untuk dapat mengenal secara

²¹ Ibid., 704.

²² Paus Fransiskus, “Message of His Holiness Francis for the Celebration of the World Day of Peace,” *Libreria Editrice Vaticana*, diakses pada 25 September 2023, https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvi-giornata-mondiale-pace-2014.html.

mendalam beberapa ribu orang,²³ terutama membina hidup baik terhadap mereka semua. Dengan demikian, Ensiklik *Fratelli Tutti* secara langsung memiliki konsekuensi bagi seluruh dunia dan membutuhkan perhatian lebih dalam implementasinya.

Berdasarkan dengan yang telah penulis sampaikan di muka, bahwa baik itu isu lingkungan dan isu kemanusiaan yang diangkat oleh Paus, merupakan respon atas sikap tegasnya bagi dunia yang memiliki tema yang sama yaitu isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan menjadi sentral karena manusia memiliki kebutuhan minimal yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, akan menyebabkan manusia terancam dan tidak dapat hidup dengan layak. Pada titik inilah, penulis memaknai bahwa terjadi anomali bahwa Paus Fransiskus mengurus urusan di luar Gereja, yaitu isu kemanusiaan; walaupun seruannya dibingkai dengan kata-kata yang bernuansa agama.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada aspek unit analisis individu psikologi politik Paus Fransiskus sebagai aktor yang memiliki kontribusi besar pada isu kemanusiaan melalui kebijakan yang tertulis dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*. Walaupun begitu, penulis akan mengelaborasi secara mendalam isu kemanusiaan yang dimaksudkan melalui analisis naratif Ensiklik *Fratelli Tutti*. Dengan demikian, penulis akan menganalisis korelasi di keduanya dan menilai tingkat pengaruh psikologi terhadap kontribusi besarnya terhadap isu kemanusiaan bagi dunia melalui analisis wacana atas dokumen tersebut.

²³ Vittorio Hösle, "Philosophical Reflections on *Fratelli Tutti*," dalam *The Proceedings of the Webinar on Fratelli Tutti*, ed. Pierpaolo Donati, Roland Minnerath, Marcelo Sánchez Sorondo, Stefano Zamagni, *Studia Selecta* 6, (Vatican: The Pontifical Academy of Social Sciences, 2021), 26.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah penulis paparkan di muka, maka pertanyaan penelitian yang penulis ajukan sebagai berikut: **“Bagaimana aspek *Presidential Character* Kardinal Bergoglio mempengaruhi kebijakan terhadap isu kemanusiaan melalui Ensiklik *Fratelli Tutti*?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk memberikan data kualitatif yang adekuasi mengenai sisi-sisi ilmiah alasan terdalam Paus Fransiskus peduli terhadap isu kemanusiaan di dunia. Dalam konteks keilmuan Hubungan Internasional, isu kemanusiaan menjadi penting, karena menyangkut isu yang melintasi lintas batas negara. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengetahui alasan terdalam dari Paus Fransiskus tersebut yang mempengaruhinya dalam ikut terlibat dalam urusan dunia dan tertuang dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*, meskipun tugas awalnya hanya sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba menyelidikinya secara cermat dan akan berujung kepada jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah penulis ajukan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada penelitian isu kemanusiaan yang ternyata dapat dipengaruhi oleh sisi psikologis untuk pilihan-pilihan kebijakannya. Dengan begitu, penelitian ini dapat menambah kepustakaan bagi keilmuan Hubungan Internasional yang berkaitan dengan

kontribusi Paus melalui pilihan-pilihan kebijakannya pada sisi kemanusiaan. Singkatnya, penelitian ini memberikan gambaran yang mampu dipertanggungjawabkan bahwa faktor internal dari seseorang mempengaruhinya dalam bertindak dan mempengaruhi dunia.

1.4. Kajian Literatur

Dalam penelitian yang membahas sisi psikologi Paus Fransiskus ini, penulis menggunakan literatur buku *The Presidential Character: Predicting Performance in the White House with a Revised and Updated Foreword by George C. Edwards III*. Dalam buku dijelaskan mengenai teori Presidential Character yang akan dijelaskan sebagai kerangka pemikiran dalam analisis penelitian ini. Barber menunjukkan bahwa Presiden sebagai sosok publik yang memiliki moralitas yang tinggi, sehingga dapat mengambil keputusan yang rasional walaupun berada di situasi tekanan apapun.²⁴ Buku ini membantu penulis dalam memberikan instrumen analisis terhadap penelitian ini.

Dalam mengetahui kecenderungan-kecenderungan dari Paus Fransiskus dalam memimpin, penulis menggunakan literatur kedua, yang dikarang oleh Anyu, Ivanov, dan Sepehri, “*Case Study of Leadership of Jorge Mario Bergoglio (Pope Francis I): Leadership Theories, Applications, and Practice.*” Dalam artikel jurnal dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi visi dan caranya dalam memimpin. Pengarang memberikan pengertian bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan dalam mengartikulasi visi dan meraih simpati publik. Pada artikel jurnal ini, menggunakan Teori Sifat (*Trait Theory*), yang dimana

²⁴ James David Barber, *The Presidential Character: Predicting Performance in the White House with a Revised and Updated Foreword by George C. Edwards III* (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2020), 5-8; 17-19.

menunjukkan seseorang mewarisi kualitas atau sifat tertentu yang membuatnya menjadi sosok pemimpin.²⁵ Pada konteks Paus, menggunakan pengalaman pribadinya dalam mempengaruhi orang lain dan menunjukkan komunikasi sebagai tujuannya. Dalam artikel jurnal pada masa remaja, Paus merupakan pribadi yang mandiri dan pekerja keras, sehingga menyebabkan dirinya mengalami infeksi paru-paru dan paru-paru sisi kanan harus diangkat. Selain itu, pada masa itu, dirinya selalu tertarik dengan hal-hal yang bernuansa rohani, baik itu dalam pengalaman Panggilan Tuhan dan memiliki kesukaan untuk membaca teologi. Ketika menjadi seorang pemuka agama (romo), beliau senantiasa menyoroti kasus-kasus yang bernuansa sosial, seperti secara halus mengkritik pemerintah Argentina yang menurutnya tidak dapat mengurus masyarakat. Saat beliau menjadi pemimpin Gereja Katolik, banyak pekerjaan yang dilakukannya. Mengatasi kebobrokan dan imoralitas intern, misalnya, menjadi isu sentral dalam kepemimpinannya. Menjadi pemimpin yang partisipatif, misalnya lagi, senantiasa digaungkan oleh Paus bahwa setiap rohaniwan harus terlibat dialog dan membangun tindakan nyata bagi masyarakat.²⁶

Lebih lanjut, dalam mengetahui kecenderungan-kecenderungan Paus Fransiskus secara nyata melalui instrumen kebijakan (yang tampak), penulis menggunakan artikel jurnal ketiga, yang dikarang oleh Ricardo A. Crespo dan Christina C. Gregory, "*The Doctrine of Mercy: Moral Authority, Soft Power, and the Foreign Policy of Pope Francis.*" Pada artikel ini menggunakan konsep *soft*

²⁵ J. Ndumbe Anyu, Sergey Ivanov, dan Mohamad Sephiri, "Case Study of Leadership of Jorge Mario Bergoglio (Pope Francis I): Leadership Theories, Applications, and Practice," *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 16, no. 5 (2019): 63, <https://www.proquest.com/openview/12a5040b8b1a1a9dfc6acd72141675e0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=39006>.

²⁶ Ibid., 60-67.

power yang digadang oleh Nye, dimana kekuatan yang bersifat militeristik dan ekonomi (kecenderungan *hard power* dan koersif) dapat digantikan oleh preferensi kekuatan lain yang tidak terwujud, seperti budaya, nilai-nilai politik, kebijakan yang mengarah pada otoritas moral hingga kecenderungan kepribadian yang dianggap menarik. Oleh karenanya, kekuatan lunak (*soft power*) tergambar dalam beberapa daya tarik seperti terhadap lembaga, nilai tertentu, corak budaya, hingga kebijakan yang dilakukan oleh figur tertentu; serta menimbulkan kesan tertentu kepada orang lain dengan cara-cara immaterial. Dalam konteks artikel ini, Paus Fransiskus dicermati bahwa menggunakan *soft power* dalam mengadvokasi kebijakannya, terlebih dalam framing Doktrin kerahiman.²⁷ Menurut Crespo dan Gregory, framing Doktrin Kerahiman merupakan salah satu bentuk lain *soft power* yang ditawarkan Paus Fransiskus yang digerakkan oleh belas kasih, pengampunan, dan diyakini dapat memperbaiki (memberikan angin baru pada) tatanan politik dunia. Doktrin Kerahiman sebagai *soft power* ini dapat ditiru oleh para pemimpin negara lain. Lebih lanjut, Doktrin Kerahiman mengungkapkan posisi dunia yang tidak setara sehingga Paus Fransiskus mengungkapkan pandangan intelektualitasnya serentak spiritualnya dalam kebijakannya dan dipahami oleh Crespo dan Gregory dalam tiga permasalahan yang paling kentara.²⁸ *Pertama*, dalam permasalahan orang miskin (kesenjangan ekonomi), Paus Fransiskus menunjukkan bahwa mengakui penderitaan orang merupakan bagian dari menciptakan dunia yang lebih harmonis, sehingga sektor keuangan dan ekonomi harus berdasarkan pada kebaikan bersama untuk ‘pembangunan

²⁷ Ricardo A. Crespo dan Christina C. Gregory, “The Doctrine of Mercy: Moral Authority, Soft Power, and Foreign Policy of Pope Francis,” *International Politics* (2020): 1; 3-4, <https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-019-00187-7>.

²⁸ Permasalahan tersebut adalah lingkungan hidup, orang-orang terasing, dan orang miskin. *Ibid.*, 7.

manusia.’ Menurut pengarang, Paus Fransiskus dinilai menolak sumber-sumber ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang dengan alasan efisiensi, Paus Fransiskus menolak adanya kesenjangan bagi mereka yang memiliki penghasilan tinggi yang terus memperoleh kekayaan secara eksponensial (meningkat cepat dari waktu ke waktu), dan menolak hak negara untuk melakukan kontrol yang ketat dengan tujuan mengantisipasi keburukan. Paus Fransiskus memberikan solusi atas permasalahan pertama ini dengan mengajak Umat Katolik dalam mendorong kesetaraan untuk mengubah struktur kelembagan ekonomi, mengajak para politikus (pemangku kebijakan) untuk terlibat dalam penyelesaian dengan dialog pencarian atas penyebab ketidaksetaraan tersebut.²⁹ Dalam permasalahan lingkungan hidup, *kedua*, Paus Fransiskus melihat bahwa orang miskin merupakan penerima dampak atas permasalahan lingkungan hidup, karena orang miskin senantiasa kesulitan terhadap akses kesetaraan atas kebutuhan dasar (air). Para penulis mencermati bahwa Paus Fransiskus merasa cemas bahwa ada kalangan yang dengan semena-mena memboroskan sumber daya alam, sedangkan penerima dampak atas kerusakan tersebut merupakan orang miskin yang tidak mendapatkan sumber daya tersebut. Kemudian solusi yang ditawarkan dalam permasalahan kedua ini adalah memadukan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan martabat manusia dan pembangunan yang memberikan dampak. Selain itu, dalam pemahaman Teologi Katolik, lingkungan hidup merupakan ‘milik bersama’ dengan tujuan ‘kebaikan bersama’ sehingga membutuhkan penanganan serius dalam menghormati setiap individu, kesejahteraan bersama dan pengembangan kapasitas masyarakat.³⁰ Permasalahan mengenai orang asing, *ketiga*, diarahkan

²⁹ Ibid., 9-10.

³⁰ Dengan kata lain, penulis memahami berdasarkan artikel pengarang bahwa pendekatan ekologis menuntut pendekatan yang bersifat sosial. Ibid., 10-11.

pada mereka yang sedang mencari suaka (pengungsi, imigran) dan komunitas sesama jenis (LGBTQ). Paus Fransiskus menyatakan bahwa Gereja Katolik tidak pernah ‘menolak’ orang berdosa, melainkan terbuka bagi siapa saja dengan semangat belas kasih, kelembutan dan pengampunan. Dengan begitu, dalam permasalahan ini, Paus Fransiskus ingin semangat inklusivitas ini ditiru sehingga terjadi harmoni sosial yang memuat persatuan dan keberagaman luar biasa (sebagai kekayaan bersama).³¹

Setelah mengetahui kecenderungan-kecenderungan Paus, penulis menggunakan artikel keempat, yang dikarang oleh Otor, “Membangun Kembali Dialog Keagamaan: Telaah Deskriptif-singkat atas Ensiklik *Fratelli Tutti* menurut Paus Fransiskus.” Pada artikel jurnal ini menggunakan teori dialog David Bohm, dimana dialog mengandaikan terdapatnya sesuatu yang ‘melewati’ dan terjadi ‘di antara kita’ sehingga adanya partisipasi setiap aktor pada dialognya. Lebih jauh Bohm menegaskan bahwa dialog merupakan cara kita menunda pendapat pribadi dengan mendengarkan pendapat pihak lain, sehingga adanya ruang-ruang kebenaran dalam dialog.³² Dalam artikel jurnal dijelaskan bahwa melalui dialog yang berakar dari agama, Paus Fransiskus mengajak semua orang dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Melalui dua pendasaran historis Ensiklik *Fratelli Tutti*, Paus menunjukkan bahwa melalui pengalaman dialog keagamaan, memungkinkan memperjuangkan nilai perdamaian. Pendasaran historis pertama, dijelaskan Fransiskus Asisi melakukan dialog dengan Sultan Malik Al-Kamil, ketika sedang terjadi keretakan hubungan antara Islam dengan Kristen dalam

³¹ Ibid., 13-14.

³² Fransiskus Sulaiman Otor, “Membangun Kembali Dialog Keagamaan: Telaah Deskriptif-singkat atas Ensiklik *Fratelli Tutti* menurut Paus Fransiskus,” *Jurnal Dekonstruksi* 3, no. 1 (2021): 13-14, <http://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/45>.

Perang Salib (terjadi sekitar tahun 1219). Dasar dari tindakan Fransiskus adalah Tuhan tidak menghendaki peperangan, melainkan kehendak Tuhan adalah perdamaian. Pada waktu itu, Fransiskus diperlakukan sebagai tamu terhormat dan Sultan mendengarkan hal yang disampaikannya tanpa terpengaruhi untuk berpindah keyakinan. Sultan memiliki alasan untuk menerima Fransiskus karena tindakan yang dihayati oleh Fransiskus, pilihan hidup kesederhanaan dilakukan seperti dalam kerangka persaudaraan Sufi (kaum mistik islam yang berpakaian wol yang ditambal). Pendasaran historis kedua, dijelaskan bahwa dialog Paus Fransiskus dengan Sheikh Ahmad El-Tayeb di Abu Dhabi. Uniknya, perjumpaan tersebut merupakan pembaharuan atas perjumpaan yang telah dilakukan Santo Fransiskus dengan Sultan Al-Kamil 800 tahun lalu. Perjumpaan ini menghasilkan dokumen Tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama pada tahun 2019. Dalam perjumpaan itu, mereka membangun persepsi bersama untuk membangun perdamaian dan toleransi di dunia secara berkelanjutan. Dalam artikel jurnal ini kiranya merupakan sebuah ajakan kepada manusia mengakui adanya pesan-pesan kemanusiaan yang diperjuangkan selalu, yaitu mengakui adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta mengajak kepada pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang berlandaskan semangat kemanusiaan.³³

Agak senada Otor, pengarang Piwko dan Sawicka, melihat yang berbeda dari ensiklik *Fratelli Tutti* ini. Namun perbedaannya adalah terletak aspek umum implikasi ensikliknya, terhadap isu kemanusiaan. Artikel jurnal kelima yang berjudul “*Humanitarian Aspects of the Migration Policy Towards the Muslim Population in Terms of the Encyclical Fratelli Tutti by Pope Francis,*” membahas

³³ Ibid., 13-23.

kebijakan yang diangkat oleh Paus Fransiskus mengenai belas kasih dan persaudaraan. Pada artikel jurnal ini, konsep yang digunakan adalah hak asasi manusia, yang menurut pengarang berasal dari agama Kristen. Terdapatnya hak asasi manusia karena konsekuensi dari gagasan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah sehingga berkonsekuensi pada martabat, kebebasan dan kesetaraan manusia.³⁴ Pengarang menunjukkan bahwa Paus Fransiskus melalui dokumennya, berbicara sebagai seorang politisi (Pemimpin Negara Vatikan), bukan sekadar Kepala Gereja biasa, karena fokusnya kepada martabat manusia. Seruannya, untuk kepada siapapun pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian khusus pada nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai universal, kebebasan, dan persaudaraan yang tanpa batas. Dalam ensikliknya, Paus Fransiskus secara konsisten untuk mendukung para imigran agar martabat kemanusiaannya dihormati, walaupun terdapat tantangan yang signifikan seperti kecenderungan budaya tertutup dari budaya yang seringkali dianggap asing. Usulan nyata Paus Fransiskus kepada pemangku kebijakan adalah memberikan status kewarganegaraan yang penuh kepada imigran dan menolak diskriminasi kepada mereka, selain itu seruannya kepada dunia agar meminimalkan segala konflik bersenjata terjadi serta faktor kelaparan di dunia diselesaikan.³⁵ Dengan demikian, pada kesimpulannya, melalui nilai-nilai yang dianut oleh Paus Fransiskus sebagai Kepala Gereja ternyata memungkinkan terjun ke dalam isu-isu strategis dunia.

Pada artikel-artikel jurnal sebelumnya, menurut hemat penulis memiliki kelemahan bahwa belum adanya penerapan lebih lanjut pada suatu konteks

³⁴ Aldona Piwko dan Zofia Sawicka, "Humanitarian Aspects of the Migration Policy Towards the Muslim Population in Terms of the Encyclical Fratelli Tutti by Pope Francis," *European Journal of Science and Theology* 17, no. 6 (2021): 39, www.ejst.tuiasi.ro/Files/91/4_Piwko_Sawicka.pdf.

³⁵ Ibid., 39-51.

tertentu dan kondisi tertentu. Oleh karenanya, kelemahan tersebut berusaha diperbaiki oleh Anyanwu dalam literatur artikel jurnalnya. Pengarang berusaha mengimplementasikan ensiklik *Fratelli Tutti* dalam konteks Afrika, dengan judul “*Confronting the Rising ‘Concentration Camps’ in Africa with the Anthropological Appeals of Fratelli Tutti of Pope Francis.*” Pada artikel jurnal keenam ini, memakai konsep kamp konsentrasi, dimana terdapat dua pemaknaan dalam menjelaskannya. *Pertama*, berbekal tulisan Viktor E. Frankl, kamp konsentrasi merupakan penderitaan orang-orang pada pemerintahan Nazi dengan pemimpin Adolf Hitler, dimana di dalam kamp tersebut terdapat penyiksaan, pembantaian, krematorium, hingga kamar gas (untuk membunuh). Namun, *kedua*, pada pemaknaan sekarang, kamp konsentrasi sebagai monumen sejarah yang merujuk pada serangkaian tindakan pada kebencian dan penghinaan terhadap manusia sehingga menolak sisi kemanusiaannya, yang di mana para pengagas sudah tiada, namun antek-anteknya tetap hidup sehingga mencederai martabat manusia.³⁶ Dalam artikel jurnal ini, pengarang menunjukkan betapa keji dan mengerikan orang Eropa melakukan pembantaian yang tersistematis terhadap kemanusiaan yang ada di Afrika. Pengarang menggunakan ensiklik *Fratelli Tutti* Paus Fransiskus yang dianggap tepat dalam menghadapi permasalahan Afrika. Menurut penemuan pengarang, alasan bangsa Eropa melakukan tindakan tersebut adalah mereka membela kepentingan sendiri dari barbarisme bengis dalam sejarah manusia yang sejatinya ditujukan pada orang Afrika. Selain itu, upaya pemerintahan yang baik, semakin terhambat karena tata kelola yang buruk dan

³⁶ Stophynus Ugochukwu Anyanwu, “Confronting the Rising ‘Concentration Camps’ in Africa with the Anthropological Appeals of *Fratelli Tutti* of Pope Francis,” *A Journal of Contextual Theology* 7 (2021): 1-2, <https://journals.ezenwaohaetorc.org/index.php/Ministerium/article/view/1920/1949>.

korupsi di dalam kelembagaan pemerintah, serta upaya militer yang seharusnya melindungi masyarakat sebaliknya melakukan tindakan tidak terpuji. Melalui ensiklik *Fratelli Tutti*, ditunjukkan semangat persaudaraan dan keterbukaan atas penerimaan siapapun orangnya, sehingga setiap orang merasa diterima tanpa adanya pembatasan yang terjadi. Dengan demikian, pada kesimpulannya, ensiklik *Fratelli Tutti* membuat rasa kebersamaan dan saling menghormati adalah penting, terlebih adanya kesadaran bahwa eksistensi diri ada karena kita yang bersama.³⁷

Senada dengan Anyanwu, terdapat pengarang yang membahas ensiklik *Fratelli Tutti* yang diterapkan dalam kondisi tempat tertentu, namun perbedaannya Harmakaputra menganalisis dalam konteks Indonesia. Artikel jurnal ketujuh yang dimaksud berjudul “*Fratelli Tutti and Interreligious Friendship: An Indonesian Christian Reflection.*” Dalam artikel jurnal dibahas mengenai beberapa poin penting dalam membahas keterkaitan ensiklik *Fratelli Tutti* dengan dialog antar agama Kristen dengan agama Muslim Indonesia. Pengarang berhasil memperlihatkan bahwa kerusuhan Ambon tidak meledak secara besar karena adanya upaya akar rumput yang meredamnya, seperti yang dilakukan LSM Peace Provocateurs. Pengarang menunjukkan bahwa melalui bingkai *Fratelli Tutti*, ternyata upaya bina damai dilakukan dengan siapapun orangnya. Dengan demikian, pengarang menyimpulkan bahwa Paus Fransiskus memiliki kapabilitas dalam menyatukan semua manusia dan mewujudkan apa yang disebut keadilan dan perdamaian.³⁸

³⁷ Ibid., 17-33.

³⁸ Hans A. Harmakaputra, “Fratelli Tutti and Interreligious Friendship: An Indonesian Christian Reflection,” *The Journal of Social Encounters* 5, no. 1 (2021): 14-18, https://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=social_encounters.

Secara keseluruhan dari artikel-artikel jurnal dan buku dalam kajian literatur ini memberikan pemahaman yang mendalam bahwa ensiklik *Fratelli Tutti* memiliki implikasi yang luas bagi dunia. Mulai dari pemaknaan ensiklik *Fratelli Tutti* secara telaah deskriptifnya oleh Otor memberikan pemahaman bahwa pesan kemanusiaan bisa terjadi ketika adanya pengakuan terhadap kesetaraan dengan melakukan dialog keagamaan. Senada dengan Otor, Piwko dan Sawicka memberikan pemaknaan yang lebih luas bahwa ensiklik bukan hanya dilihat dari cara pengakuan dengan melakukan dialog agama, tetapi ensiklik memiliki implikasi bahwa terhadap isu kemanusiaan harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan dengan memberikan status kewarganegaraan kepada para imigran. Namun, telaah deskriptif dan telaah implikasi tidaklah cukup memadai. Oleh karenanya, Anyanwu dan Harmakaputra berusaha melihatnya dan menganalisis dengan masing-masing kasus Afrika dan Indonesia. Pada kasus Afrika, ensiklik *Fratelli Tutti* tepat dalam menghadapi permasalahan kemanusiaan, tetapi terdapat kelemahan signifikan pada tata kelola lembaga pemerintah yang menyebabkan permasalahan kemanusiaan tidak dapat dilaksanakan. Pada kasus Indonesia, ensiklik *Fratelli Tutti* memberikan pemahaman bahwa kerusuhan Ambon dapat diredam dengan gerakan akar rumput. Itu artinya, keadaan bahwa upaya bina damai dalam menjaga persaudaraan dapat tercapai.

Walaupun mayoritas membahas dari sisi ensikliknya, terdapat pengarang yang menuliskan secara murni sisi kepemimpinan Paus Fransiskus yang berpengaruh bagi publik, namun sisi kepemimpinan tersebut tidak secara langsung mengarah pada implikasi pembuatan kebijakan melalui ensiklik *Fratelli Tutti*. Selanjutnya, terdapat artikel jurnal yang mengungkapkan kecenderungan Paus

Fransiskus yang ternilai dalam framing Doktrin Kerahiman sebagai cara *soft power* pada kebijakannya. Namun demikian, implikasi dari artikel jurnal tersebut hanya memuat tiga masalah yakni lingkungan hidup, orang-orang terasing, dan orang miskin. Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan atas penelitian-penelitian sebelumnya dan berbekal buku psikobiografi James Barber, penulis hendak menyelidikinya berdasarkan kerangka instrumen *Presidential Character*, sekaligus menganalisis dengan instrumen tipologi Preston dalam melihat pemimpin mengendalikan jabatannya dan akan memberikan analisis naratif yang sesuai untuk mengecek kesesuaian kecenderungan psikologi tersebut berkorelasi langsung atau tidak berkorelasi langsung pada keluaran kebijakannya melalui ensiklik *Fratelli Tutti*.

1.5. Kerangka Pemikiran

Teori *Presidential Character* merupakan teori yang disusun oleh James David Barber pada tahun 1972. Pada saat itu, metode teorinya muncul bertepatan Presiden Richard M. Nixon menyelesaikan jabatannya sebagai Presiden. Namun, dua tahun (1974) kemudian, terjadi fenomena skandal politik dan mengakibatkan krisis konstitusi di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut disebut Skandal Watergate, dan dari peristiwa tersebut berujung peristiwa pemakzulan Presiden Nixon.³⁹ Dalam teorinya tersebut mengungkapkan bahwa adanya keterkaitan yang erat antara kecenderungan-kecenderungan psikologis seseorang presiden terhadap pola politiknya. Pola politik tersebut tercermin dalam pengambilan keputusan atas

³⁹ James David Barber, *The Presidential Character: Predicting Performance in the White House With a Revised and Updated Foreword by George C. Edwards III*, 5.

kebijakannya dan keputusan tersebut yang membuat seorang presiden tersebut menjadi unik.⁴⁰

Teori *Presidential Character* memiliki tujuan untuk menganalisis seorang presiden sebagai tokoh publik yang memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, sehingga dalam kondisi tekanan apapun dapat mengambil keputusan yang rasional. Terdapat tiga instrumen analisis dalam teorinya, yaitu karakter, cara pandang, dan gaya. Dalam instrumen karakter ini, yang ditekankan adalah dalam konteks masa kanak-kanak, dimana seseorang mempunyai harga diri, kemampuannya dalam berpikir kritis, dan seseorang dapat menerima kritik di tempat kerjanya.⁴¹ Oleh karena terjadi dalam konteks kanak-kanak, maka instrumen karakter ini menjadi faktor penentu cara seseorang menjadi manusia.⁴² Artinya, sikap seseorang itu saat menghadapi pengalaman, dan menghadapi dirinya sendiri sehingga akan memperjuangkan banyak hal yang dihargainya.⁴³ Dalam instrumen cara pandang ini, yang ditekankan adalah dalam konteks masa remaja. Pada masa remaja, seseorang mempunyai keyakinan politik yang sesuai pemahamannya dan melihat pengalaman tertentu dengan cara pandang yang berbeda.⁴⁴ Instrumen ini menjadi pembentuk keyakinan seseorang, sehingga terbentuk dimensi kausalitas antara apa yang dilihatnya dengan pendapat pribadi yang telah dilihatnya.⁴⁵ Konsekuensinya pada instrumen ini dapat mempengaruhi sikap pemimpin dalam mengambil kebijakan tertentu. Dalam instrumen gaya ini, yang ditekankan adalah dalam konteks dewasa, dimana seseorang mempunyai

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., 6.

⁴² Menurut Barber, Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti ukiran. *Lih.* Ibid., 16.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., 7.

⁴⁵ Ibid., 16.

kemampuan dalam membangun relasi, dan memiliki performa dalam berbicara di depan umum.⁴⁶ Instrumen ini menjadi cara implementasi seseorang dalam memandang dunia di hadapan publik,⁴⁷ terkhusus visualisasi diri melalui media massa.

Lebih jauh, instrumen-instrumen tersebut akan mengkategorisasi seseorang dalam empat tipe karakter. Menurut Barber, ada tipe karakter pasif-negatif, tipe karakter pasif-positif, tipe karakter aktif-negatif, dan tipe karakter aktif-positif. Pada tipe karakter pasif-negatif, seseorang memiliki penghargaan diri yang rendah, kewajiban hanyalah sebuah kewajiban yang seharusnya terjadi, mampu beradaptasi dengan suasana namun tidak dapat melakukan kepemimpinan yang efektif dan efisien, serta dalam mengambil keputusan hanya sebatas prosedural saja.⁴⁸ Dalam tipe karakter pasif-positif, merupakan seseorang yang mempunyai sikap yang patuh, selalu tunduk atau bahkan mengalah, mampu mengarahkan orang sehingga terkesan optimis namun motivasinya dangkal, dan kecenderungan memiliki harapan agar menghilangkan keraguan dari orang lain untuk melakukan sesuatu.⁴⁹ Dalam tipe karakter aktif-negatif, seseorang yang mempunyai kemampuan dalam mengerjakan segala sesuatu, namun kecenderungannya melakukan pekerjaannya secara kompulsif. Terkadang seseorang yang berada di tipe ini melupakan kesenangan sehingga lebih mengutamakan pekerjaan yang sangat didorong dari ambisinya.⁵⁰ Dalam tipe karakter terakhir, aktif-positif, dimana seseorang yang mampu dengan konsisten menikmati pekerjaan, memiliki

⁴⁶ Ibid., 7.

⁴⁷ Ibid., 16.

⁴⁸ Ibid., 18.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

harga diri yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan fleksibel serta mengambil keputusan yang rasional tanpa tekanan dari luar.⁵¹

Selanjutnya, melalui serangkaian analisis presidential character Barber belum cukup memadai, oleh karenanya penulis membutuhkan dua instrumen tipologi yang diperkenalkan Preston. Asumsi tipe kepemimpinan Preston, adalah menunjukkan bahwa aktor yang berperan sangat menentukan dalam proses mengendalikan jabatannya. Melalui Preston, domain kebijakan sebagai sebuah indikator bahwa keterlibatan seorang pemimpin terhadap karakteristik jabatannya. Tipologi indikator pertama adalah kebutuhan seorang pemimpin untuk mengontrol dan terlibat dalam proses kebijakan, dan tipologi kedua adalah sensitivitas pada konteks (termasuk lingkungan kebijakan, kendala pada kelembagaan, dan pandangan terhadap bawahan⁵² (atau rekan)).

Pada tipologi pertama, yaitu ada tipe Pengarah (*Director*), tipe Hakim (*Magistrate*), tipe Penyelenggara (*Administrator*), dan tipe Pengurus (*Delegator*). Pada tipe Pengarah (*Director*), kebutuhan untuk kontrol terpusat pada lingkaran dalam kebijakan; pemimpin ikut terlibat dalam kontrol dan langsung pada proses kebijakan; memiliki pandangan kebijakan sendiri dan membingkai isu-isu sesuai yang ditetapkan pada pedoman kebijakan tertentu; dan kecenderungan pemimpin untuk mengandalkan diri sendiri terkait penilaian kebijakannya sendiri ketimbang penasihat ahlinya.⁵³ Pada tipe Hakim (*Magistrate*), kebutuhan untuk kontrol terpusat pada lingkaran dalam kebijakan; preferensi atas kebutuhan untuk terlibat mulai terbatas pada seluruh proses kebijakan; menetapkan sistem pendelegasikan

⁵¹ Ibid.

⁵² Martha L. Cottam, Elena Mastors, Thomas Preston, dan Beth Dietz-Uhler, *Introduction to Political Psychology*, 123.

⁵³ *Lih.* Ibid., 124.

(penyerahan tugas) terkait perumusan dan implementasi kebijakan; dan pemimpin cenderung bergantung pada pandangan penasihat ahli ketimbang pendapatnya sendiri.⁵⁴ Pada tipe Penyelenggara (*Administrator*), kebutuhan untuk kontrol tidak terlalu terpusat melainkan bersifat kolegial; preferensi atas kontrol tidak dibutuhkan dalam proses kebijakan maupun terhadap bawahan; pemimpin lebih cenderung untuk mengadvokasi pandangan terhadap isu tertentu, menetapkan pedoman-pedoman tertentu pada konsepsinya; dan seorang pemimpin lebih mengandalkan penilaian sendiri ketimbang penasihat ahli.⁵⁵ Pada tipe pengurus (*Delegator*), kebutuhan kontrol bersifat kolegial; preferensi pemimpin dalam proses kebijakan tidak ada; pemimpin lebih menekankan delegasikan perumusan atas kebijakan kepada bawahan; dan penasihat ahli lebih berperan dominan pada pengambilan keputusan kebijakan.⁵⁶

Pada tipologi kedua, yaitu tipe Navigator (*Navigator*), tipe Pengamat (*Observer*), tipe Pengawas (*Sentinel*), dan tipe Pemimpin yang tidak Konvensional atau independen (*Maverick*). Pada tipe Navigator (*Navigator*), kebutuhan pemimpin yang tinggi pada informasi kebijakan luar negeri dan mengumpulkan informasi pada lingkungan pemangku kebijakan; memiliki tingkat kecenderungan sensitivitas terhadap pencarian informasi dan saran saran dari aktor luar lingkungan pemangku kebijakan.⁵⁷ Pada tipe Pengamat (*Observer*), kebutuhan pemimpin yang tinggi pada informasi namun minatnya terbatas pada kebijakan luar negeri; dalam mengumpulkan informasi sangat detail namun sangat memiliki ketergantungan yang tinggi pada saran penasihat ahli; dan kecenderungan kurang

⁵⁴ *Lih.* Ibid.

⁵⁵ *Lih.* Ibid.

⁵⁶ *Lih.* Ibid.

⁵⁷ *Lih.* Ibid., 125.

peka terhadap kendala-kendala pada kebijakannya sendiri.⁵⁸ Pada tipe Pengawas (*Sentinel*), kebutuhan pemimpin rendah dalam mencari informasi namun memiliki minat yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri; memiliki kecenderungan untuk merespon sensitivitas pada kendala ataupun saran dari aktor luar lingkungan pemangku kebijakan; dan kecenderungan untuk menghindari pencari informasi yang tidak relevan berdasarkan pengalaman yang terjadi pada masa lampau maupun pandangan pribadi pemimpin.⁵⁹ Pada tipe Pemimpin yang tidak konvensional (*Maverick*), kebutuhan yang rendah dalam mencari informasi dan minat yang rendah pada kebijakan luar negeri; keputusan cenderung didorong dari kebijakan yang istimewa dan lebih mengutamakan prinsip-prinsipnya sendiri; dan cenderung kurang peka terhadap kendala yang terjadi, kurang inisiatif dalam mencari informasi atau saran dari luar lingkungan pemangku kebijakan.⁶⁰

Secara definisi, kemanusiaan adalah pilihan rasional. Konsekuensi dari rasionalitas tersebut, membawa definisi yang dimaknai Dean sebagai sebuah perbedaan makna yang dimana perbedaan tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh para penafsirnya dan makna kemanusiaan yang sebenarnya terjadi.⁶¹ Kemanusiaan atau humanisme, merupakan sebuah pergumulan yang dialami oleh manusia dalam memahami dan memaknai eksistensi (ke”beradaan”nya) dirinya dalam hubungan dengan kemanusiaan orang lain di dalam sebuah kelompok komunitas.⁶²

⁵⁸ *Lih. Ibid.*

⁵⁹ *Lih. Ibid.*

⁶⁰ *Lih. Ibid.*

⁶¹ Victor Chidi Wolemonwu, “Richard Dean: The Value of Humanity in Kant’s Moral Theory,” *Medicine, Health Care and Philosophy* 23 (2020): 221, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11019-019-09926-2>.

⁶² Bartolomeus Samho, “Bab 1: Humanisme Yunani Klasik dan Abad Pertengahan,” dalam *Humanisme dan Humaniora*, ed. Bambang Sugiharto, (Bandung, Pustaka Matahari, 2013), 17.

Pada zaman Yunani Kuno, misalnya, kemanusiaan dipandang sebagai sisi etimologis, *humus* (Yun. tanah) yang kemudian berkembang sebagai *homo* (Yun. manusia, dan kemudian akhirnya disebut sebagai *humanus* (Yun. sifat kemanusiaan atau sifat menyerupai tanah).⁶³ Pada saat ini, misalnya, Daniel Chernilo memberikan pemahaman bahwa kemanusiaan bertumpu pada psikologis dan kekayaan intelektual kita, juga yang berfokus pada sifat-sifat yang menjadikan kita memiliki status melekat sebagai makhluk sosial, seperti bahasa, tanggung jawab, dan juga pertimbangan reflektif atas rencana-rencana pribadi.⁶⁴

Sebagai bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, maka hasil dari kebijakan tersebut adalah berupa tulisan (teks) yang mencerminkan prioritas pemimpin. Teks merupakan sesuatu yang kita konstruksi maknanya.⁶⁵ Oleh karenanya penulis menentukan analisis wacana kritis dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Bagi Fairclough, terdapat empat metode dalam melakukan analisis wacana kritis. *Pertama*, berfokus pada kesalahan (ketidakberesan atau kejahatan) sosial dalam aspek semiotiknya. *Kedua*, mengidentifikasi penghalang-penghalang dalam menangani kesalahan sosial itu. *Ketiga*, adanya pertimbangan dalam tatanan sosial itu ‘membutuhkan’ kesalahan sosial tersebut. *Keempat*, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin layak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut (solusi).⁶⁶

Pada instrumen *pertama*, berfokus pada kesalahan (ketidakberesan atau kejahatan) sosial dalam aspek semiotiknya, yang dimana kesalahan sosial

⁶³ Ibid., 19.

⁶⁴ Dave Elder-Vass, “What is Humanity?” *Journal of Social Theory* 21 (2009): 1, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1600910X.2019.1687097>.

⁶⁵ Alan McKee, *Textual Analysis: A Beginner’s Guide* (London: SAGE Publications, 2003), 4.

⁶⁶ Norman Fairclough, “Critical Discourse Analysis,” dalam *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*, ed. James Paul Gee dan Michael Handford, (London dan New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2013), 13.

dipahami Fairclough sebagai aspek-aspek dalam sistem sosial, bentuk dan tatanan yang dapat merugikan atau bahkan merusak kesejahteraan bersama (*well-being*) dan kesalahan tersebut dapat diperbaiki namun harus melalui perubahan yang mendasar (radikal).⁶⁷ Dalam mengkonstruksi kesalahan sosial itu, Fairclough memberikan dua tips, yaitu melalui pendekatan lintas keilmuan, peneliti memilih topik penelitian tentang kesalahan sosial tersebut dengan berfokus pada pola relasi dialektik antara semiotika dengan fenomena lainnya yang relevan; melakukan korelasi teoretik topik penelitian lintas ilmu dengan mengkonstruksi juga objek penelitian yang dipilih.⁶⁸

Pada instrumen *kedua*, mengidentifikasi penghalang-penghalang dalam menangani kesalahan sosial itu, yang dimana menyelidiki cara kehidupan sosial terorganisir dan terstruktur sehingga dapat menghindari kesalahan sosial dan menangani upaya tersebut.⁶⁹ Fairclough memberikan tiga tahapan, yaitu lakukan analisis hubungan dialektik antar semiosis dan elemen sosial lainnya: antara unsur wacana dengan realitas praktik sosial, antara teks dengan unsur-unsur kejadian; melakukan seleksi teks dan berfokus pada analisis teks sesuai dengan tujuan objek penelitian; dan melakukan analisis teks, entah itu analisis interdiskursif, maupun analisis linguistik atau semiotik.⁷⁰

Instrumen *ketiga*, adanya pertimbangan dalam tatanan sosial itu ‘membutuhkan’ kesalahan sosial tersebut, dimana adanya pertimbangan tertentu antara ‘yang seharusnya’ dengan ‘yang faktual’ terjadi. Jika dari pengamatan tersebut, diketahui adanya tatanan sosial yang menyebabkan kesalahan sosial yang

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., 13-14.

⁶⁹ Ibid., 14.

⁷⁰ Ibid.

besar maka itu menjadi alasan dalam kemungkinan perubahannya.⁷¹ Instrumen *keempat*, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin layak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dimana berfokus pada elemen hubungan dialektik antara semiosis dengan elemen lainnya yang ada pada prosesnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.⁷² Fokus semiosis yang telah berjalan selama ini dipertentangkan, dibantah dengan wacana yang dapat melawan strategi arus utama semiosis tersebut dan mendukung strategi alternatif.⁷³

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif, penulis menampilkan data deskriptif, sehingga tujuan penulis capai adalah menyajikan penelitian yang mampu menyingkapkan aspek makna dan pemahaman⁷⁴ di balik keputusan-keputusan yang dilakukan Paus Fransiskus sebagai Kepala Negara Vatikan menerbitkan kebijakan luar negeri melalui *Fratelli Tutti*. Oleh karenanya, data yang ditampilkan cenderung kepada analisis individu berupa psikobiografi Beliau. Menurut Murray dan Kluckhohn, studi psikobiografi merupakan metode memahami uniknya kepribadian seseorang dengan memberikan informasi yang terkait dengannya.⁷⁵ Keunikan tersebut, dapat mempertegas bahwa kepemimpinan seseorang dapat diprediksi melalui kecenderungan pola tindakan yang terpengaruh dengan mengklasifikasikan

⁷¹ Ibid., 15.

⁷² Ibid.

⁷³ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 22.

⁷⁴ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 62.

⁷⁵ Alan C. Elms, "Psychobiography and Case Study Methods," dalam *Handbook of Research Methods in Personality Psychology*, ed. Richard W. Robins, R. Chris Fraley, Robert F. Krueger, (New York: The Guilford Press, 2007), 98-99.

seseorang ke dalam salah satu dari empat jenis kepribadian yang ditawarkan oleh Barber.⁷⁶ Lebih lanjut, dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan jenis metode, naratif berfokus pada mengeksplorasi kehidupan individu Paus Fransiskus, dengan menggunakan data analisis berupa dokumen, laporan, kisah-kisah hidupnya yang telah penulis dapatkan.⁷⁷ Dengan demikian, data yang penulis tampilkan dapat dipercaya kebenarannya⁷⁸ dan data tersebut sesuai dengan konteks yang terjadi.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Setiap data yang terkumpul dapat berbentuk data sekunder. Dalam data primer, penulis mendapat sumber secara langsung tanpa interpretasi (pengolahan) sedikitpun.⁷⁹ Sebaliknya, dalam data sekunder, merupakan dokumen yang sudah mendapatkan interpretasi atau pengolah dari orang lain, seperti artikel jurnal, berita-berita dan buku yang dianggap relevan. Oleh karenanya, data yang tersaji di dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengambilan sampel data kualitatif yang bersifat *purposive sample* penulis lakukan dengan tujuan arah penelitian dan sesuai dengan relevansi pada unit analisis⁸⁰ yang telah penulis tentukan di muka. Dengan demikian, analisis data penulis lakukan berbasiskan elaborasi kreatif antara pengaruh psikologi terhadap kontribusinya terhadap isu kemanusiaan tersebut.

⁷⁶ Ibid., 99.

⁷⁷ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, 113.

⁷⁸ W. Lawrence Neuman, "Strategies of Research Design," dalam *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, ed. W. Lawrence Neuman, 7th ed. (Harlow: Pearson Education Limited, 2014), 218.

⁷⁹ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, 172.

⁸⁰ Alan Bryman, *Social Research Methods* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 4 th ed., 418.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab 1 pendahuluan yang akan memuat posisi dari penelitian yang akan penulis bahas di bab selanjutnya. Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 membahas keterlibatan Paus Fransiskus dalam isu kemanusiaan di dunia. Pada bagian ini, dijabarkan Ensiklik *Fratelli Tutti*, analisis naratif pidato Paus Fransiskus, analisis Ensiklik *Fratelli Tutti* menggunakan instrumen Norman Fairclough, dan struktur pemerintahan Vatikan.

Bab 3 membahas analisis *Presidential Character* pada Paus Fransiskus. Analisis tersebut akan memberikan instrumen karakter, cara pandang dan gaya dari Paus Fransiskus. Dari setiap instrumen tersebut, penulis akan memberi satu dari empat kategori tipe karakter Paus Fransiskus tersebut. Selain itu, penulis akan menambahkan indikator tipologi Preston terkait karakteristik keterlibatan Paus Fransiskus dalam kebijakan.

Bab 4 merupakan bab terakhir penelitian yang akan termuat kesimpulan atas penelitian ini.